
MEDIA MASSA DAN PENYEBARAN ISU PEREMPUAN

Machya Astuti Dewi

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta

Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan Yogyakarta, Telp. (0274) 485268

Hp. 0815678911900/e-mail : Machdewi@yahoo.com,

Abstract

Mass media has significant role in dispersing women issues. Especially in conducive political opportunity structure, feminist ideology shared by woman activists grows rapidly. International women discourses informed by mass media influence, adopted, and motivate what women activists will do. And finally mass media play important role in the struggle for gender equality. Mass media inform and campaign for news and informations so that the readers or audiences give greater attention and awareness in women's rights. In the Indonesia context, many women from Non Governmental Organizations influenced by international issues and international phenomena in their struggle for women empowerment. They learn almost all the international issues and phenomena from mass media, especially newspaper and internet. For the example, the vagina monolog performance in Madisson square motivated the Indonesian women activist to performed the same thing in Indonesia. On the other hand, Indonesian women activists always share their feminist ideologi or campaign for women empowerment in newspapers, magazines and internet. Many Indonesian people realize that the encouregement for women, gender equality and women empowerment are the important things to do. And all what Indonesian women activists have done become a reality that mass media has very important role in campaigning for women issues and gender equality.

Key words : *political opportunity structure, mass media role, feminism.*

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir ini muncul fenomena maraknya tayangan isu-isu perempuan oleh media massa, baik surat kabar, majalah, televisi maupun film. Kompas, Suara Pembaruan dan Suara Merdeka merupakan beberapa contoh media massa surat kabar yang sering memuat isu dan wacana tentang perempuan. Sementara itu melalui media film kita juga pernah menyaksikan nilai-nilai feminisme dalam film “Pasir Berbisik” dan “Perempuan Berkalung Sorban”. Di media internet fenomena tersebut lebih terlihat lagi dengan hadirnya situs-situs organisasi perempuan dengan wacana-wacana kritis yang dibangun oleh para aktivisnya. Fenomena ini menarik mengingat isu-isu perempuan, terutama yang bernuansa feminis nyaris tidak bisa ditemui di media massa pada periode sebelum akhir 1990-an ketika itu Indo-

nesia masih dipimpin oleh Soeharto yang cenderung mengambil kebijakan menempatkan perempuan di sektor domestik sebagai isteri yang mengabdikan pada suami atau ibu yang setia menjaga keluarga dibandingkan sebagai pribadi yang memiliki otonomi. Di sini terlihat peran media massa amatlah besar sebagai wahana untuk menyuarakan isu-isu dan kepentingan perempuan.

Perkembangan menarik tersebut akan dianalisis dengan mencoba melihat bagaimana media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan isu perempuan. Secara lebih khusus lagi tulisan ini akan melihat bagaimana dalam konteks politik yang membuka dan memberi kesempatan untuk lebih bebas berwacana, media massa memainkan peran penting dalam menyebarkan isu-isu perempuan, terutama setelah perhatian dunia terhadap persoalan perempuan kian

menguat pasca Konferensi Perempuan Internasional di Beijing tahun 1995. Tulisan ini pertama-tama akan diawali dengan melihat keterkaitan antara terbukanya kesempatan politik di level nasional dan internasional dengan terbukanya kesempatan bagi media massa untuk mengekspos wacana yang sebelumnya hampir tidak pernah dibicarakan orang. Kemudian, penulis akan mengajak pembaca untuk beresplorasi melihat keragaman isu perempuan yang diekspos oleh media massa untuk mengetahui media massa mana yang sering memuat isu perempuan feminis dan isu perempuan non feminis setelah sebelumnya diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan isu perempuan feminis dan non feminis. Selanjutnya keragaman isu perempuan dalam media massa akan dikaitkan dengan konteks peluang politik macam apakah yang sedang tersedia di level nasional dan internasional sehingga media massa memilih isu tersebut untuk ditampilkan. Pembahasan akan diakhiri dengan melihat bagaimana dalam atmosfer kesempatan politik yang mendukung, media massa berperan besar sebagai sumber inspirasi dan sekaligus sebagai media bagi aktivis gerakan perempuan untuk terus menyuarakan isu-isu perempuan.

Media Massa dan Kesempatan Politik

Media massa memiliki peran besar dalam mengembangkan dan menyebarluaskan wacana dan peristiwa internasional. Isu, wacana dan peristiwa yang berkembang atau terjadi di sebuah negara dengan cepat akan menyebar ke negara-negara lain berkat pemberitaan media massa. Peristiwa yang bisa diangkat sebagai contoh adalah maraknya aksi gerakan mahasiswa di berbagai kota di Indonesia pada akhir 1980-an dan terutama pada tahun 1990-an. Berkembangnya aksi-aksi gerakan mahasiswa Indonesia tersebut tidak lepas dari peran media massa dalam memberitakan kebangkitan gerakan mahasiswa di Philipina yang menuntut Ferdinand Marcos mundur dari jabatannya pada tahun 1986 dan aksi gerakan mahasiswa Cina di lapangan Tiananmen Cina pada tahun 1989 menentang pemerintahan sosialis dan menuntut pemerintahan yang demokratis. Peristiwa-peristiwa dan isu-isu yang diangkat oleh gerakan mahasiswa di dua negara tersebut yang

kemudian disebarluaskan melalui pemberitaan media massa telah mendorong para aktivis mahasiswa di Indonesia untuk melakukan aksi serupa.

Gelombang aksi gerakan mahasiswa di berbagai negara dengan wacana demokratisasi yang mereka angkat merupakan imbas dari menguatnya wacana demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) akibat meredanya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mencairnya ketegangan ideologi di antara dua blok yang berseberangan tersebut pada akhir 1980-an mendorong tumbuhnya isu-isu global yang semasa perang dingin terpinggirkan, seperti demokratisasi dan perlindungan HAM. Peluang tersebut ditangkap oleh para aktivis sosial, termasuk mahasiswa untuk melakukan aksi-aksi menentang otoriterisme Soeharto dan menuntut demokratisasi. Lahirnya aksi-aksi tersebut tentu saja tidak terlepas dari pengaruh pemberitaan media massa mengenai wacana apa yang sedang berkembang di level internasional dan peristiwa apa yang sedang terjadi di negara-negara manca.

Di Indonesia peran besar media massa sebagai pembawa dan penyebar isu internasional demokrasi dan HAM yang kemudian mempengaruhi pergerakan aktivis mahasiswa berkembang beriring dengan "keterbukaan" iklim politik yang diciptakan oleh rezim Soeharto pada awal 1990-an dan kemudian diikuti oleh periode transisi menuju demokrasi sejak akhir masa kekuasaan Soeharto (Sebagian pengamat politik, misalnya Arief Budiman mengemukakan bahwa keterbukaan yang diciptakan oleh Soeharto adalah keterbukaan semu, karena di satu pihak Soeharto mendung-dung isus keterbukaan, tetapi di lain pihak masih melakukan kontrol yang ketat atas kebebasan berpendapat.

Periode ini ditandai oleh berkurangnya otoritarianisme negara menuju kondisi politik yang lebih demokratis yang membuka peluang kebebasan media massa untuk mengambil peran sebagai aktor perubahan sosial. Anders Uhlin menggambarkan Indonesia pada periode akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an berada pada fase pra transisi menuju demokrasi. Pada masa ini dominasi negara atas masyarakat masih kuat, namun sedikit demi sedikit mulai meluntur.

Kelompok masyarakat sipil yang didominasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang relatif independen muncul sebagai kekuatan sosial politik yang cukup berpengaruh. Terlebih lagi karena negara menjadi semakin sulit untuk menerapkan kontrol pada rakyat. Selain LSM terdapat beberapa aktor penting lain yang juga tumbuh sebagai kekuatan oposisi melawan pemerintah pada dekade 1990-an. Mereka adalah para aktivis kampus, kaum profesional, jurnalis, seniman, pengacara dan kalangan akademisi. Mereka lazim dikenal dengan sebutan sebagai "oposisi kelas menengah". Dari kalangan media massa gerakan oposisi dilakukan dalam bentuk pemberitaan beberapa media tentang peristiwa-peristiwa yang melibatkan konflik antara negara dan masyarakat.

Tidak saja isu-isu global mengenai HAM dan demokrasi, dalam fungsinya sebagai pemberi informasi media massa juga telah berperan penting dalam menyebarkan wacana tentang perempuan. Media massa aktif meliput dan memberitakan hasil-hasil konferensi perempuan internasional. Informasi yang dibawa oleh media massa sejak konferensi di Meksiko City tahun 1975 hingga Beijing tahun 1995 mengilhami kaum perempuan di berbagai negara mendirikan organisasi perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Terlebih lagi pasca konferensi Beijing tahun 1995 yang melahirkan Deklarasi Beijing semakin banyak media massa menampilkan isu perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa media massa senantiasa menangkap peristiwa internasional untuk kemudian disebarkan ke masyarakat. Kesempatan politik bagi kaum perempuan di seluruh dunia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan karena mendapat momen yang tepat pasca konferensi Beijing banyak didukung oleh peran media massa dalam menyebarkan hasil-hasil konferensi sekaligus sebagai wadah bagi para aktivis perempuan untuk mewacanakan isu-isu perempuan. Media massa, terutama televisi dan surat kabar memainkan peran penting dalam mempengaruhi masyarakat umum (McAdam, McCarthy, Zald, 1988:723). Pengaruh yang dibawa oleh media massa ini terlihat dari semakin maraknya publik membicarakan isu-isu perempuan pasca Konferensi Beijing, terutama isu mengenai

arti penting melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Isu ini kemudian mendorong kaum perempuan di berbagai negara mendesak pemerintah untuk menerapkan kuota 30% bagi perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan.

Ragam Isu Perempuan

Isu perempuan adalah isu yang memiliki dampak langsung terhadap perempuan. Cakupan isu perempuan di antaranya adalah hak reproduksi, persoalan perawatan anak, masalah ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, HAM, pendidikan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kesehatan dan agama. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa isu perempuan amatlah beragam, mulai dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi sebagai perempuan hingga persoalan yang lebih bersifat publik.

Keragaman isu perempuan bersumber dari adanya dua jenis kepentingan perempuan. Menurut Molyneux (1986:284) kepentingan perempuan dapat dibedakan menjadi kepentingan gender "praktis" dan kepentingan gender "strategis". Kepentingan gender praktis berangkat dari kondisi-kondisi konkret yang dialami perempuan sehari-hari. Kepentingan gender praktis tidak mempersoalkan konstruksi gender yang tidak adil, melainkan bersumber dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka sebagai perempuan. Contoh kepentingan gender praktis adalah masalah pemeliharaan anak, perawatan kesehatan, kebutuhan sanitasi lingkungan, air bersih dan pemenuhan kebutuhan pangan.

Sementara itu kepentingan gender strategis lahir dari adanya subordinasi perempuan dalam masyarakat yang mendorong keinginan untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil gender. Kepentingan gender strategis inilah yang identik dengan isu-isu feminis. Contohnya adalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemberian kesempatan bagi perempuan di bidang politik, dan kebebasan bagi perempuan untuk memiliki anak atau tidak, termasuk untuk melakukan aborsi.

Isu-isu perempuan yang diekspos media

massa amat beragam. Bukan saja karena isu perempuan tidaklah tunggal, tetapi juga karena ekspos media massa amat terkait dengan wacana populer yang sedang banyak dibincang oleh masyarakat. Salah satu isu perempuan yang populer di masyarakat dan pernah disorot oleh media massa adalah posisi perempuan yang masih terpinggirkan di bidang politik. Isu ini mendapat perhatian dari berbagai surat kabar terutama menjelang pemilu tahun 2004 dan kembali berulang pada tahun 2009 ketika saat itu kuota keterwakilan perempuan ramai disuarakan oleh para aktivis perempuan. Isu lain yang juga banyak diangkat media massa adalah kekerasan terhadap perempuan. Isu ini mendapat perhatian media massa, baik

media cetak maupun elektronik karena semakin banyak fenomena kekerasan terhadap perempuan yang terungkap, padahal Undang-Undang (UU) Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah disahkan dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan telah gencar dilakukan para aktivis perempuan. Beberapa contoh ragam isu perempuan yang diekspos oleh media massa surat kabar dapat disimak pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 menunjukkan bahwa isu yang paling banyak disorot oleh media massa selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah persoalan perempuan di lembaga politik serta kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sangatlah wajar mengingat kedua isu ini adalah isu yang sedang

Tabel 1 Ragam Ekspos Isu Perempuan di Beberapa Surat Kabar

No	Judul Artikel	Surat Kabar	Tanggal
1	Berita Televisi Banyak Menyudutkan Perempuan	Kompas	19 November 2009
2	Misi Perdamaian Empat Wanita TNI di Lebanon	Kompas	10 Desember 2008
3	Menggalang Kerjasama untuk Memenangkan Pemilu 2004: Ormas dan LSM Tak Kompak Soal Isu Perempuan	Kompas	28 Desember 2006
4	Isu Anak Terpinggirkan dalam Pilkada	Kompas	16 April 2005
5	Isu Perempuan Masih Dipahami Parsial	Kompas	21 Mei 2004
6	Perempuan Disubordinasi Politik Representasi Media	Kompas	19 Juli 2004
7	Media dan Perjuangan Identitas Perempuan Pasca Orde Baru	Kompas	21 Juli 2003
8	Mengapa Perempuan Harus Dilibatkan dalam Resolusi Konflik di Aceh	Kompas	7 Juli 2003
9	Meneg PP: Perlu Perbaikan Strategi, Suara Pembaruan, 1 September 2009	Suara Pembaruan	1 September 2009
10	Hari Ibu, Gerakan Perempuan dan Relevansinya Kini	Suara Pembaruan	22 Desember 2008
11	Mengefektifkan Peran Politik Perempuan	Suara Pembaruan	1 Juni 2004
12	Sebagian Pejabat belum Paham Soal Gender	Suara Pembaruan	3 Agustus 2000
13	Perempuan Indonesia Dipinggirkan dalam Proses Politik	Suara Pembaruan	18 Oktober 2001
14	Komitmen HAM untuk Mencekal KDRT	Pikiran Rakyat	4 Januari 2005
15	Media Massa harus Mengarusutamakan Gender	Pikiran Rakyat	25 April 2005
16	Penetapan Caleg Perempuan: Dianggap Melawan Kedaulatan Rakyat	Kedaulatan Rakyat	19 Januari 2009
17	Parlemen dan Parpol perlu "friendly women"	Kedaulatan Rakyat	9 November 2007
18	Tantangan Persoalan Perempuan	Suara Merdeka	28 Desember 2006
19	Relevansi Pilkada bagi Perempuan	Suara Merdeka	1 Maret 2005
20	Perlu Penguatan Komunitas Basis	Suara Merdeka	25 November 2004

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

mengemuka pada dekade 2000, terutama setelah berlangsung Konferensi Perempuan sedunia di Beijing pada tahun 1995. Sebagaimana diketahui, Konferensi Beijing menghasilkan 12 butir area kritis di bidang pemberdayaan perempuan yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Beijing. Dua belas pokok persoalan yang menjadi perhatian dalam Deklarasi Beijing meliputi: (1) anak perempuan; (2) perempuan dan pendidikan; (3) perempuan dan ekonomi; (4) kekerasan terhadap perempuan; (5) perempuan dan kesehatan; (6) perempuan dan media; (7) perempuan dan lingkungan; (8) hak asasi manusia; (9) perempuan, kekuasaan dan pengambilan keputusan; (10) perempuan dan kemiskinan; (11) perempuan dan konflik bersenjata; dan (12) institusi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Para aktivis perempuan di berbagai negara kemudian gencar memperjuangkan dua belas bidang persoalan perempuan tersebut baik melalui aksi-aksi pemberdayaan langsung kepada perempuan maupun berwacana melalui berbagai media massa.

Fenomena yang tidak kalah menarik bisa kita simak melalui media internet. Beragam situs organisasi berperspektif feminis menyajikan bahasan isu-isu perempuan dari sudut pandang feminis. Beberapa di antara organisasi tersebut bisa disimak sebagai berikut:

tulisan berbunyi “Perempuan dan Pria Setara di Hadapan Tuhan” di setiap tampilan situs *online*-nya. Artikel bernada feminis dapat dibaca misalnya dalam tulisan ustadz Faqihuddin Abdul Kodir berjudul: “Menengok Hijrah Nabi: Dari Kesadaran Menuju Gerakan Penguatan Perempuan”. Demikian pula artikel K.H. Hussein Muhammad: “Hijrah dalam Al Quran:- Refleksi bagi Kebangkitan Perempuan”. Kedua artikel tersebut mengajak kepada semua pembaca agar memaknai hijrah 1 Muharram sebagai momen untuk membuka kesadaran akan adanya ketimpangan gender dan sekaligus untuk membangun kesadaran untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik (www.rahima.or.id/index.php?...hijrah...suara-rahima..., 14 November 2009).

Contoh lain dari semangat penyebaran ideologi feminis bisa dilihat dari situs Jaringan Islam Liberal (JIL). Organisasi yang berupaya membongkar dan mengkritisi ajaran-ajaran Islam yang selama ini dipercaya atau diyakini sebagai kebenaran oleh banyak kalangan ini senantiasa menyajikan dekonstruksi wacana tentang ajaran-ajaran Islam lengkap dengan analisis yang logis. Beberapa contoh upaya dekonstruksi pemahaman ajaran Islam tentang perempuan antara lain mengenai poligami yang dalam prakteknya banyak

Tabel 2 Situs-Situs Feminis di Internet

No	Nama Lembaga	Alamat Situs
1	Rahima (Pusat Pendidikan, Info Islam dan Hak-Hak Perempuan)	http://www.rahima.or.id
2	Interseksi Foundation	http://www.interseksi.org
3	Institut Perempuan	http://www.institutperempuan.or.id
4	Dewa-ap	http://www.dewa-api.com
5	Women Research Institute	http://wri.or.id
6	Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)	http://www.asppuk.or.id
7	Komunitas Perempuan INDIPT Kebumen	http://perempuan.indipt.org
8	Jaringan Islam Liberal (JIL)	http://Islamlib.com

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Situs-situs di table 2 tersebut mengekspos beragam isu perempuan dengan perspektif feminis. Simak misalnya situs Suara Rahima. Ketika membuka situs tersebut maka kita akan mendapati

“mudlatnya” karena apa yang disebut adil sulit untuk bisa diwujudkan karena berkaitan dengan soal perasaan. Istri-istri nabi pun –sebagai manusia-menghadapi perasaan semacam itu, yaitu saling

cemburu. Bahkan kehidupan Nabi sebenarnya cenderung monogami karena hanya memiliki satu isteri, yaitu Khadijah selama 25 tahun. Nabi baru melakukan poligami setelah Khadijah meninggal. Keputusan Nabi Muhammad itu pun karena bertujuan untuk menolong janda dan anak-anak korban perang. Contoh lain, masih berkait dengan dekonstruksi pemahaman ajaran Islam tentang perempuan adalah soal pemakaian jilbab yang menurut JIL bukan sebuah keharusan bagi seorang Muslimah. JIL mengemukakan ada kesalahan tafsir dalam memahami ayat-ayat Al Quran yang menyebabkan muncul keyakinan bahwa perempuan harus berjilbab (islamlib.com/id/komentar/benarkah-poligami-sunah/, Diakses 14 November 2009).

Sumber Inspirasi dan Media Kampanye bagi Gerakan Perempuan

Peran media massa sebagai pemberi informasi pada gilirannya mendorong perkembangan gerakan perempuan di Indonesia. Peristiwa-peristiwa internasional dan nasional yang diliput dan diberitakan melalui media massa telah berhasil menggerakkan perhatian kaum perempuan untuk bersatu menyuarakan kepentingan perempuan. Serangan Amerika terhadap Afghanistan (kapan) misalnya, telah memberi inspirasi bagi kelompok perempuan di Indonesia untuk turun ke jalan dan berdemonstrasi. Pertunjukan Vagina Monolog di Madison Square 10 Februari 2001 yang sukses luar biasa mendorong para aktivis perempuan di Indonesia menggelar pertunjukan serupa. Aksi berskala internasional yang diliput oleh media massa tidak kalah pentingnya dalam menggerakkan aktivisme perempuan. Kampanye melawan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dalam bentuk aksi bersama di berbagai negara, hingga tragedi penyiksaan dan pembunuhan Patricia dan Maria Theresa Mirabel oleh penguasa Republik Dominika pada tanggal 25 November 1960 yang diberitakan media massa telah mendorong perempuan di seluruh dunia menggalang solidaritas bersama atas kekerasan yang menimpa perempuan.

Tragedi dan kampanye-kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yang diekspos oleh media massa mendorong para aktivis di

seluruh dunia, termasuk Indonesia bergabung dalam solidaritas global melawan kekerasan terhadap perempuan. Para aktivis di Indonesia bergabung dalam solidaritas ini pada tahun 1995, yaitu setelah Konferensi Perempuan Internasional IV di Beijing. Perkembangan lain yang menarik adalah munculnya berbagai organisasi perempuan antikekerasan terhadap perempuan seperti Gerakan Antikekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (GAKTPI).

Di sini terlihat bahwa media massa telah mengilhami para aktivis perempuan dari berbagai penjuru dunia bersatu menjalin kekuatan menyuarakan isu dan kepentingan perempuan. Fenomena semacam itulah yang menurut William Gamson (2004) disebut sebagai *master frame*, yaitu peristiwa di suatu tempat yang kemudian mengilhami aktivis gerakan untuk melakukan aksi serupa.

Kemajuan di bidang teknologi informasi semakin mendorong media massa memiliki andil besar dalam penyebaran gerakan perempuan di seluruh penjuru dunia (Tarrow: 1994). Hal ini bisa dibuktikan dengan semakin maraknya kelahiran dan penyebaran gerakan perempuan di berbagai negara. Kita bisa menyaksikan bagaimana partisipasi jumlah Non Governmental Organization (NGO) perempuan meningkat pesat semenjak konperensi perempuan internasional I di Mexico city tahun 1975, Konperensi perempuan II di Belanda tahun 1980, Konperensi perempuan III di Nairobi tahun 1985, hingga konperensi perempuan IV Di Beijing tahun 1995.

Keberhasilan gerakan perempuan dalam mengkampanyekan hak-hak perempuan tidak terlepas dari iklim yang mendukung perkembangan ideologi feminis. Dukungan dalam bentuk publikasi oleh media massa dalam mengkampanyekan dan menuntut hak-hak perempuan sangat menunjang kelangsungan dan keberhasilan gerakan feminis di berbagai negara (Taylor, 1990: 298).

Sejak dekade 1980-an jaringan feminis mulai menyebar secara transnasional melintasi batas-batas negara. Dalam era yang ditandai oleh kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi media massa berperan besar dalam mendorong kerjasama antar aktivis perempuan di seluruh penjuru dunia. Selama dekade 1990-an organisasi-

organisasi perempuan telah meningkatkan jaringan dalam bentuk kegiatan bersama, dialog, solidaritas dan tukar menukar dukungan. Jaringan feminis transnasional menyatukan kaum perempuan dari berbagai negara dengan satu agenda bersama, seperti hak asasi perempuan, kritik feminis atas kebijakan ekonomi, perdamaian dan anti-militerisme, kesehatan dan hak-hak reproduksi. Kelompok-kelompok feminis dan organisasi perempuan tetap memperjuangkan isu-isu di tingkat lokal, namun kosa kata, strategi dan tujuan-tujuan mereka memiliki kemiripan satu sama lain dan mengambil bentuk-bentuk supra nasional. Lebih dari itu organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok ini telah bergabung atau membantu membentuk jaringan feminis transnasional, sehingga mampu menghubungkan wacana dan aksi di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Mereka terlibat dalam pertukaran informasi, saling memberi dukungan, penelitian bersama, lobi, advokasi dan kadang-kadang aksi langsung untuk mewujudkan tujuan mereka meraih kesetaraan, otonomi dan pemberdayaan perempuan dan demokratisasi dalam pemerintahan nasional dan global.

Salah seorang aktivis perempuan di Yogyakarta membenarkan bahwa media massa berperan penting dalam membawa isu perempuan yang sedang berkembang di level internasional ke dalam pemahaman aktivis perempuan di dalam negeri Indonesia: *"Kita selalu ngikuti perkembangan lewat media. Isu-isu kesehatan reproduksi, hasil konperensi Beijing itu kita tahu dari media massa"* (Wawancara dengan Amin Muftiyannah, 11 Mei 2004).

Selain menjadi sumber inspirasi bagi aktivis perempuan untuk melakukan gerakan, media massa juga dimanfaatkan oleh aktivis perempuan sebagai wahana bagi untuk melakukan pendidikan politik bagi perempuan. Menjelang Pemilu 2004 Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Yogyakarta memanfaatkan surat kabar sebagai media untuk melakukan penyadaran masyarakat dan penguatan hak politik perempuan melalui penulisan kolom media di surat kabar Bernas. Beberapa persoalan yang pernah diangkat oleh KPI di kolom surat kabar Bernas adalah tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga pengambil

keputusan, arti penting melibatkan perempuan dalam forum rembug desa, dan bahwa perempuan memiliki karakter politik yang sangat diperlukan di bidang politik. Lewat media massa KPI berupaya meyakinkan masyarakat bahwa masuknya perempuan dalam dunia politik akan dapat mengurangi ego politik yang dimiliki politisi dan pemerintah dalam menjalankan negara karena perempuan telah terbiasa untuk tidak egois dan turut memikirkan semua pihak dalam keputusan politiknya.

Media massa juga digunakan oleh organisasi-organisasi perempuan untuk membuka kesadaran publik tentang arti penting keadilan gender. LSM Sehati di Yogyakarta misalnya, senantiasa bekerjasama dengan berbagai media massa: televisi lokal, surat kabar dan radio untuk mengkampanyekan isu-isu perempuan yang diperjuangkan kepada publik. Menurut Sehati, penggunaan media massa lebih efektif sebagai media berkampanye dibandingkan merumuskan rekomendasi yang tebal, yang belum tentu dibaca oleh pengambil kebijakan. Meskipun demikian langkah yang disebut terakhir tersebut juga tetap dilakukan oleh Sehati untuk meneruskan poin-poin penting yang telah dihasilkan dalam kegiatan Sehati, terutama kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan lembaga legislatif (Wawancara dengan Esti Susilarti, 11 September 2009).

Organisasi perempuan yang lain, yaitu Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) di Yogyakarta juga memanfaatkan media massa untuk mengkampanyekan hak-hak perempuan. Yasanti menggunakan media siaran radio untuk melakukan dialog interaktif sebagai bagian dari upaya melakukan penyadaran masyarakat dan pendidikan politik untuk buruh perempuan. Tujuan Yasanti adalah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya buruh perempuan melalui pendidikan politik. Dalam setiap diskusi Yasanti mengundang sekitar 20 orang peserta yang mayoritas perempuan untuk mengikuti dialog interaktif. Mereka terdiri dari para buruh, aktivis buruh, dan ornop-ornop di kawasan industri Jawa Tengah seperti Ungaran, Bawen, Karangjati, Salatiga, Semarang. Narasumber yang diundang adalah para aktivis perempuan dan pakar hukum yang membahas topik diskusi yang berbeda. Topik

yang pernah dibahas antara lain tentang hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Topik lain yang juga pernah diangkat dalam dialog adalah tentang perempuan dan politik hukum di Indonesia yang ternyata masih diskriminatif terhadap perempuan sebagaimana antara lain terlihat dari UU Perkawinan (Laporan Yasanti Tahun 2000).

Menjelang pemilu 2009 pemanfaatan media massa mendapatkan perhatian serius dari para aktivis gerakan perempuan. Menyadari arti penting media massa sebagai wahana untuk melakukan komunikasi politik antara caleg perempuan dengan konstituen, maka KPI DIY mengadakan pelatihan untuk para caleg perempuan dari wilayah DIY, Jawa Tengah dan Kalimantan. Selama pelatihan para caleg perempuan tidak saja mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana membaca daerah pemilihan dengan perspektif gender, peraturan pemilihan umum dan cara melakukan kalkulasi politik, tetapi yang tidak kalah penting KPI juga melatih para caleg perempuan agar memiliki ketrampilan dalam memanfaatkan media massa sebagai wahana komunikasi politik. Upaya memanfaatkan media massa sengaja diberikan mengingat media massa amatlah penting untuk mensosialisasikan program-program yang hendak ditawarkan oleh caleg perempuan, sebagai media promosi bagi caleg perempuan dan sekaligus mendekatkan caleg perempuan dengan konstituennya (Wawancara dengan Retno Agustin, 24 Juni 2009).

Pada skala nasional arti penting media massa sebagai sarana kampanye bagi caleg perempuan juga disadari oleh sebuah LSM internasional di Jakarta, yaitu Asia Foundation. Lembaga ini secara serius memberikan pembekalan kepada para caleg perempuan agar dapat menggunakan media massa untuk “menjual” nama mereka. Bagi sebagian besar peserta pemanfaatan media massa merupakan hal yang baru yang belum mereka kembangkan. Setelah mengikuti pelatihan tersebut akhirnya peserta menjadi lebih paham mengenai cara bagaimana menggunakan media untuk membantu mereka mengartikulasikan dan menyebarluaskan pesan-pesan politik (asia foundation.org/publications/pdf/263, diakses 6 Mei 2009).

Simpulan

Media massa telah berperan besar dalam menyebarkan isu-isu internasional, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan persoalan perempuan. Isu tentang perempuan yang banyak diekspos oleh media massa sejak pertengahan 1990-an telah membuat banyak pihak, terutama aktivis perempuan semakin gencar memperjuangkan kepentingan perempuan. Dalam iklim yang memberi peluang bagi maraknya wacana tentang perempuan, media masa juga telah dimanfaatkan oleh para aktivis gerakan perempuan sebagai wahana untuk mengkampanyekan hak-hak perempuan.

Pelajaran berharga yang bisa diambil di sini adalah bahwa media massa menjadi aktor penting dalam menyebarkan isu-isu internasional ke dalam pemahaman masyarakat di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Di sini kejujuran dalam menyajikan berita dan kearifan media massa untuk menyaring informasi menjadi sangat penting mengingat media massa bisa membentuk opini publik. Berkait dengan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, maka media massa sangat diharapkan dapat menginformasikan dan turut membantu kampanye para aktivis perempuan dengan menyajikan berita dan informasi yang dapat menggugah pembaca atau pemirsa untuk peduli pada hak-hak perempuan.

Daftar Pustaka

- Agustin, Retno, 2009, Wawancara dengan Penulis pada 24 Juni 2009.
- Asia Foundation, *Asia Foundation, 2009, “Gender and Women’s Participation in Indonesia” dalam asiafoundation.org/publications/pdf/263, diakses 6 Mei 2009.*
- Ashaf, Abdul Firman, 2008, “Menggagas Media Lokal di Era Neoliberal”, dalam *blog.unila.ac.id/.../menggagas-media-lokal-di-era-neo-liberal*, Diakses tanggal 10 Januari 2008.
- Gamson, William, David S. Meyer, 2004, “Framing Political Opportunity” dalam Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N. Zald, *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framing*, Cambridge University Press,

- Cambridge.
- Jaringan Islam Liberal, 2007, "Benarkah Poligami Sunah" dalam *islamlib.com/id/komentar/benarkah-poligami-sunah/*, Diakses 14 November 2009.
- Koalisi Perempuan Indonesia, 2004, *Laporan pendidikan pemilih dan dialog politik temu caleg dan pemilih perempuan di DIY*, Pebruari-Maret 2004.
- McAdam, Doug, John D. McCarthy, Mayer N. Zald, 1988, "Social Movement" dalam Neil J. Smelser, *Handbook of Sociology*, Sage Publications, Newbury Park.
- Molyneux, Maxine, 1986, "Mobilization without Emancipation? Women's Interests, State and Revolution" dalam R.R. Fagen, C.D. Derre, J.L. Coraggio, *Transition and Development: Problems of Third World Socialism*, New York Monthly Review Press, New York.
- Muftiyanah, Amin, 2004, Wawancara dengan Penulis pada 11 Mei 2004.
- Suara Rahima, 2007, "Memaknai Hijrah Perspektif Perempuan" dalam *www.rahima.or.id/index.php?...hijrah...suara-rahima...*, Diakses 14 November 2009.
- Susilarti, Esti, Wawancara dengan Penulis pada 11 September 2009.
- Tarrow, Sidney 1994, *Power in Movement: Social Movement, Collective Action and Politics*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Uhlen, Anders, 1995, *Democracy and Diffusion: Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro Democracy Actors*, Lund University Press, Lund.
- Yayasan Anissa Swasti (Yasanti), 2000, *Laporan Kegiatan Tahun 2000*.